

Analisis Partisipasi Anggota, Social Capital, dan Peranan Pemerintah terhadap Keberhasilan Koperasi (Studi Komparatif antara KSU Banjar Adat dengan KSU Konvensional) di Kabupaten Buleleng

I Wayan Suwendra^{1*}, Ni Made Firayanti Pratiwi², Rindhi Marverissa³, Komang Endrawan Sumadi Putra⁴, Fridayana Yudiaatmaja⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

* I Wayan Suwendra / wayan.suwendra@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh partisipasi anggota, social capital, dan peranan pemerintah terhadap keberhasilan koperasi melalui studi komparatif antara Koperasi Serba Usaha (KSU) berbasis Banjar Adat dan KSU konvensional di Kabupaten Buleleng. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha bersama, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial serta penguatan modal sosial masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif, dengan sampel anggota dari kedua jenis KSU melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda serta uji komparatif (independent sample t-test) untuk mengetahui perbedaan pengaruh variabel antar koperasi.

Hasil penelitian menunjukkan partisipasi anggota, social capital, dan peranan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan koperasi, baik pada KSU Banjar Adat maupun KSU konvensional. Namun, terdapat perbedaan yang nyata: KSU Banjar Adat lebih unggul pada keterlibatan anggota dan kekuatan modal sosial, sedangkan KSU konvensional lebih banyak mengandalkan dukungan regulasi dan fasilitas pemerintah. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara partisipasi aktif, penguatan social capital, dan kebijakan pemerintah demi keberlanjutan koperasi.

Kata Kunci: Partisipasi anggota, Social capital, Peranan pemerintah, Koperasi, Keberhasilan

1. PENDAHULUAN

Provinsi Bali dikenal sebagai salah satu daerah strategis nasional, terutama karena kontribusi sektor pariwisata yang tinggi terhadap perekonomian. Namun demikian, di balik keberhasilan sektor pariwisata, Bali masih menghadapi berbagai persoalan mendasar dalam pembangunan, antara lain ketimpangan pendapatan, kemiskinan, serta kerentanan ekonomi lokal yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Gini Ratio di Provinsi Bali pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,381 di wilayah perkotaan dan 0,385 di perdesaan, angka yang mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan belum sepenuhnya merata. Meski tingkat kemiskinan menurun dari 8,53 persen pada 1999 menjadi 3,91 persen pada September 2022, tren penurunan tersebut relatif lambat dalam dekade terakhir (1). Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan membutuhkan terobosan baru, salah satunya melalui penguatan kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat seperti koperasi.

Koperasi telah lama dikenal sebagai sokoguru perekonomian rakyat Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Namun dalam praktiknya, koperasi di Indonesia kerap dipersepsikan lebih sebagai gerakan moral ketimbang gerakan ekonomi, sehingga kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih relatif kecil. Data Kementerian Koperasi dan UKM per Maret 2023 menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif mencapai 151.456 unit, tetapi hanya sekitar 2.003 koperasi yang konsisten menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kondisi ini mengindikasikan bahwa meski jumlah koperasi sangat banyak, kualitas kelembagaan dan kontribusinya terhadap kesejahteraan anggota masih menjadi persoalan serius.

Konteks lokal di Kabupaten Buleleng menampilkan fenomena menarik, terutama karena keberadaan **Koperasi Serba Usaha (KSU) Banjar Adat** yang berdiri di bawah kendali komunitas adat. Model ini berkembang dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak tahun 2003 yang kemudian direplikasi di wilayah lain, termasuk Buleleng. Melalui pendekatan berbasis adat, hampir setiap banjar memiliki koperasi yang berbentuk KSU. KSU Banjar Adat menonjol karena mengakar kuat dalam struktur

sosial masyarakat adat, di mana modal sosial, norma, dan ikatan budaya lokal seperti *gotong royong* dan *satya* menjadi landasan dalam tata kelola. Hal ini menciptakan karakteristik yang berbeda dibanding KSU konvensional, yang lebih mengandalkan mekanisme formal, regulasi pemerintah, dan dukungan eksternal untuk menjaga keberlanjutan.

Data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng tahun 2023 mencatat terdapat 827 unit KSU, dengan 479 di antaranya adalah KSU Banjar Adat. Dari sisi kinerja, KSU Banjar Adat menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp31,05 miliar, lebih tinggi dibanding SHU KSU konvensional yang mencapai Rp23,56 miliar. Tingkat keberlanjutan juga lebih baik, tercermin dari persentase koperasi tidak aktif yang lebih rendah (19,83 persen pada KSU Banjar Adat dibandingkan 28,45 persen pada KSU konvensional). Data ini memperlihatkan bahwa KSU Banjar Adat memiliki potensi besar untuk berkembang secara berkelanjutan dengan basis partisipasi dan modal sosial yang kuat.

Meskipun demikian, belum optimalnya kinerja koperasi, baik Banjar Adat maupun konvensional, diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, lemahnya partisipasi anggota menjadi masalah klasik karena banyak anggota yang hanya mendaftar tanpa berkontribusi aktif dalam simpanan, transaksi, atau pengambilan keputusan. Dari sisi sosial, modal sosial yang seharusnya menjadi kekuatan utama belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan dan solidaritas ekonomi antaranggota. Sementara dari sisi eksternal, peran pemerintah dalam hal regulasi, pembinaan, serta fasilitasi akses pembiayaan belum optimal menyentuh seluruh kebutuhan koperasi di tingkat akar rumput.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi anggota, modal sosial, dan peran pemerintah secara signifikan memengaruhi kinerja koperasi. Misalnya, studi di Zhejiang, Tiongkok membuktikan bahwa kinerja koperasi petani sangat dipengaruhi oleh kualitas modal sosial dan partisipasi anggota. Di Indonesia, penelitian mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan industri kecil menengah di Bali juga menegaskan adanya pengaruh signifikan regulasi dan pembinaan pemerintah terhadap keberhasilan usaha. Namun, penelitian yang secara spesifik mengombinasikan ketiga variabel ini dalam konteks perbandingan KSU Banjar Adat dan KSU konvensional masih relatif terbatas.

Dengan demikian, penting dilakukan studi komparatif yang menganalisis sejauh mana partisipasi anggota, social capital, dan peranan pemerintah memengaruhi keberhasilan koperasi pada kedua model tersebut. Kajian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan penguatan koperasi berbasis adat maupun konvensional di Kabupaten Buleleng, serta memperkaya literatur tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan ekonomi kerakyatan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Koperasi memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Sebagai lembaga yang berasaskan kekeluargaan, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Namun, meskipun jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih relatif kecil, yakni hanya sekitar 5,1% pada tahun 2022 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai persoalan mendasar terkait kualitas kelembagaan dan keberlanjutan koperasi. Koperasi modern harus melakukan reformulasi penilaian kinerja yang lebih komprehensif, mencakup dimensi finansial, sosial, dan kelembagaan (2). Dalam konteks inilah, kajian mengenai partisipasi anggota, modal sosial, dan peranan pemerintah menjadi sangat relevan.

2.1 Partisipasi Anggota

Partisipasi anggota merupakan faktor fundamental bagi keberhasilan koperasi. Anggota memegang peran ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi, sehingga keberlangsungan koperasi sangat tergantung pada keterlibatan mereka. Bentuk partisipasi dapat berupa kontribusi modal, keterlibatan dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), selanjutnya ditegaskan bahwa partisipasi anggota memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan koperasi, terutama dalam hal kepatuhan manajerial dan keberlangsungan usaha (3). Koperasi dengan tingkat partisipasi anggota yang tinggi mampu menciptakan stabilitas keuangan, memperbesar SHU, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Pada koperasi berbasis komunitas adat seperti KSU Banjar Adat, partisipasi anggota diperkuat oleh ikatan sosial dan kewajiban moral yang melekat, sehingga lebih kokoh dibandingkan koperasi konvensional yang cenderung mengandalkan insentif ekonomi.

2.2 Modal Sosial (Social Capital)

Konsep modal sosial telah banyak dibahas dalam literatur pembangunan dan ekonomi kelembagaan. Modal sosial mencakup jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam konteks koperasi, modal sosial berperan memperkuat kohesi antaranggota, meningkatkan loyalitas, serta membangun kepercayaan terhadap manajemen. Koperasi dengan modal sosial yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan RAT lebih baik dan kualitas tata kelola lebih transparan. Tren pemasaran digital di Indonesia saat ini berbasis pada nilai sosial dan kolaborasi komunitas, sehingga koperasi yang mampu mengoptimalkan modal sosialnya lebih berpeluang memenangkan kepercayaan pasar (4). Dalam konteks KSU Banjar Adat, modal sosial yang terbentuk dari nilai adat seperti *gotong royong* dan *satya* tidak hanya berfungsi sebagai pengikat sosial, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol moral yang memperkuat kepatuhan anggota.

2.3 Peranan Pemerintah

Selain faktor internal, keberhasilan koperasi juga sangat ditentukan oleh dukungan pemerintah. Peran pemerintah dapat diwujudkan melalui regulasi kelembagaan, fasilitasi akses permodalan, pengawasan, serta program pembinaan. Kebijakan pemerintah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing koperasi dan UMKM di Indonesia. Di sisi lain (5) menegaskan bahwa pada era Revolusi Industri 4.0, peran pemerintah tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga meliputi fasilitasi digitalisasi usaha, peningkatan literasi digital, dan dukungan inovasi produk agar koperasi mampu bersaing secara global. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi konvensional yang lebih mengandalkan intervensi pemerintah cenderung berbeda dengan KSU Banjar Adat, yang lebih banyak ditopang oleh struktur sosial adat namun tetap membutuhkan dukungan kebijakan makro.

2.4 Keberhasilan Koperasi

Keberhasilan koperasi dapat diukur melalui indikator finansial dan non-finansial. Secara finansial, indikator mencakup pertumbuhan aset, jumlah anggota, volume usaha, dan SHU. Secara non-finansial, keberhasilan koperasi diukur dari kualitas layanan, kepatuhan RAT, partisipasi anggota, serta peningkatan kesejahteraan. Indikator keberhasilan koperasi modern harus mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan secara seimbang (6). Temuan serupa juga menunjukkan bahwa koperasi dengan sinergi antara partisipasi anggota, modal sosial, dan peran pemerintah cenderung lebih berkelanjutan. Dalam konteks komparatif, KSU Banjar Adat relatif unggul dalam hal partisipasi anggota dan modal sosial, sementara KSU konvensional lebih bergantung pada regulasi dan dukungan pemerintah.

2.5 Kebaruan Penelitian

Literatur terdahulu banyak membahas pengaruh parsial dari partisipasi, modal sosial, atau peran pemerintah terhadap koperasi. Namun, penelitian yang mengombinasikan ketiganya dalam kerangka komparatif masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis perbedaan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap keberhasilan koperasi pada dua model kelembagaan berbeda, yaitu KSU Banjar Adat dan KSU Konvensional di Kabupaten Buleleng. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik sekaligus menjadi masukan praktis bagi pengembangan kebijakan koperasi berbasis komunitas dan kelembagaan formal.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif dengan desain komparatif**, karena tujuan utamanya adalah menganalisis pengaruh partisipasi anggota, social capital, dan peranan pemerintah terhadap keberhasilan koperasi dengan membandingkan dua tipe kelembagaan koperasi, yaitu **KSU Banjar Adat** dan **KSU Konvensional** di Kabupaten Buleleng. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memperoleh hasil yang terukur dan objektif, sementara desain komparatif diperlukan untuk melihat perbedaan pengaruh antar kelompok koperasi. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan dukungan kualitatif melalui wawancara dengan pengurus dan pejabat terkait, sehingga hasil kuantitatif dapat ditafsirkan lebih mendalam.

Partisipan penelitian adalah anggota aktif koperasi yang telah menjadi anggota minimal selama satu tahun, pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta masih aktif bertransaksi dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pengurus dan pengawas tidak termasuk dalam sampel anggota untuk menghindari bias peran. Populasi penelitian mencakup seluruh anggota koperasi di Kabupaten Buleleng baik pada KSU Banjar Adat maupun KSU Konvensional. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik **stratified random sampling** berdasarkan jenis koperasi (Banjar Adat dan Konvensional), dilanjutkan

dengan pemilihan koperasi pada tingkat kecamatan secara **probability proportional to size (PPS)**, kemudian dilakukan **simple random sampling** untuk memilih anggota yang akan menjadi responden. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5%, sehingga distribusi responden proporsional terhadap ukuran masing-masing koperasi. Sebagai panduan praktis, penelitian ini menargetkan sekitar **150–200 responden per kelompok koperasi**, sehingga total sampel berkisar **300–400 responden**.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, **penyebaran kuesioner** kepada anggota koperasi sebagai sumber utama data kuantitatif. Kedua, **dokumentasi** berupa telaah laporan RAT, laporan keuangan koperasi (aset, SHU, pertumbuhan anggota, dan kepatuhan RAT) selama tiga tahun terakhir untuk memperoleh indikator objektif keberhasilan koperasi. Ketiga, **wawancara semi-terstruktur** dengan pengurus koperasi dan pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Buleleng untuk menggali informasi tambahan mengenai bentuk partisipasi anggota, kekuatan social capital berbasis adat, serta intervensi pemerintah dalam mendukung koperasi.

Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Variabel partisipasi anggota diukur melalui indikator partisipasi ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan partisipasi sosial. Variabel social capital diukur melalui dimensi kepercayaan, norma, jejaring, dan resiprositas. Variabel peranan pemerintah mencakup regulasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan. Sementara itu, variabel keberhasilan koperasi diukur dengan kombinasi indikator **objektif** (SHU per anggota, pertumbuhan aset, pertumbuhan jumlah anggota, kepatuhan RAT, dan tingkat NPL) dan indikator **perseptual** (kepuasan anggota, efisiensi pelayanan, dan kinerja pengurus). Instrumen diuji validitasnya melalui penilaian ahli dan uji coba lapangan (pilot test), serta diuji reliabilitasnya dengan Cronbach's Alpha dan analisis faktor konfirmatori.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data yang terkumpul akan melalui proses *editing*, *coding*, dan *cleaning* untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi variabel penelitian. Kedua, untuk menguji perbedaan antar tipe koperasi dilakukan uji beda (independent sample t-test atau Mann–Whitney, tergantung pemenuhan asumsi). Ketiga, untuk menguji hubungan antar variabel digunakan **analisis Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)** karena variabel penelitian terdiri dari konstruk reflektif dan formatif. Analisis ini meliputi evaluasi model pengukuran (validitas konvergen, diskriminan, reliabilitas) dan evaluasi model struktural (koefisien jalur, nilai R^2 , f^2 , dan Q^2). Uji multi-group analysis (MGA) dilakukan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antar dua tipe koperasi. Untuk memastikan hasil yang robust, dilakukan pula uji sensitivitas, seperti membandingkan indeks keberhasilan koperasi dengan bobot sama dan bobot faktor. Data kualitatif dari wawancara dianalisis dengan metode *thematic coding* untuk menafsirkan hasil kuantitatif, khususnya dalam menjelaskan faktor budaya Banjar Adat atau regulasi pemerintah yang berkontribusi terhadap keberhasilan koperasi.

Dengan rancangan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana partisipasi anggota, social capital, dan peranan pemerintah berpengaruh terhadap keberhasilan koperasi, serta apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara KSU Banjar Adat dan KSU Konvensional di Kabupaten Buleleng.

4. TEMUAN DAN DISKUSI

4.1 Temuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi di Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, yang tercermin dari partisipasi anggota, social capital, serta peranan pemerintah. Namun demikian, pengaruh masing-masing faktor tidak seragam, melainkan bervariasi tergantung pada tipe kelembagaan koperasi, yaitu KSU Banjar Adat dan KSU Konvensional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami keberhasilan koperasi bukan sebagai suatu konsep yang tunggal, melainkan sebagai fenomena yang bersifat kontekstual, di mana nilai-nilai sosial budaya dan dukungan kebijakan memiliki peran yang berbeda sesuai dengan lingkungan tempat koperasi tersebut tumbuh.

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa **partisipasi anggota** merupakan faktor penting yang secara signifikan memengaruhi keberhasilan koperasi, baik pada KSU Banjar Adat maupun pada KSU Konvensional. Namun, kekuatan pengaruhnya lebih besar pada koperasi adat. Tingginya partisipasi anggota pada koperasi Banjar Adat dapat dijelaskan melalui mekanisme sosial yang mengikat setiap individu dalam banjar. Partisipasi anggota tidak hanya lahir dari motivasi ekonomi, melainkan juga dari kewajiban moral dan adat yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Kehadiran dalam RAT, kontribusi dalam simpanan, serta keterlibatan dalam kegiatan koperasi dipandang sebagai bagian dari

kewajiban sebagai krama banjar. Hal ini berbeda dengan koperasi konvensional, di mana keikutsertaan anggota lebih dipengaruhi oleh perhitungan rasional dan manfaat ekonomi yang diperoleh. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pada koperasi berbasis adat, partisipasi memiliki basis sosial-budaya yang lebih kuat. Temuan ini mendukung pandangan bahwa partisipasi anggota dalam koperasi dipengaruhi bukan hanya oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh norma sosial dan budaya yang berlaku dalam komunitas.(7)

Kedua, hasil penelitian mengonfirmasi pentingnya **social capital** sebagai penopang keberhasilan koperasi, terutama pada KSU Banjar Adat. Modal sosial yang kuat, berupa kepercayaan antar anggota, norma sosial yang ditegakkan, jejaring sosial yang luas, serta praktik gotong royong, terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja koperasi. Anggota KSU Banjar Adat memiliki kepercayaan tinggi bahwa sesama anggota akan memenuhi kewajibannya, dan kepercayaan ini mengurangi biaya transaksi serta risiko penyalahgunaan. Norma adat berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif, sementara jejaring sosial berbasis kekerabatan memperkuat kohesi anggota. Sebaliknya, pada koperasi konvensional, social capital relatif lebih lemah karena hubungan antar anggota lebih bersifat transaksional. Anggota datang ke koperasi terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, bukan karena ada keterikatan sosial yang mendalam. Hasil ini mendukung teori Putnam yang menegaskan bahwa modal sosial merupakan fondasi keberhasilan institusi kolektif. Penelitian ini juga konsisten dengan hasil yang menemukan bahwa modal sosial merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan kelembagaan koperasi di Indonesia (8)

Ketiga, temuan penelitian memperlihatkan bahwa **peranan pemerintah** lebih signifikan bagi koperasi konvensional dibandingkan dengan koperasi adat. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, pembinaan manajerial, pelatihan SDM, fasilitasi akses permodalan, hingga monitoring kelembagaan terbukti berpengaruh nyata terhadap keberhasilan KSU Konvensional. Hal ini dapat dipahami mengingat koperasi konvensional lebih dekat dengan struktur birokrasi formal dan lebih bergantung pada kebijakan pemerintah. Sebaliknya, pada KSU Banjar Adat, peranan pemerintah tidak terlalu signifikan karena keberhasilan koperasi lebih ditopang oleh partisipasi anggota dan kekuatan social capital. Dengan kata lain, koperasi adat relatif lebih mandiri karena mampu mengelola keberlangsungan organisasi berdasarkan nilai-nilai komunitas. Temuan ini sejalan dengan (9) yang menyatakan bahwa koperasi formal di Indonesia cenderung sangat bergantung pada intervensi pemerintah untuk dapat berkembang dan bertahan

Keempat, perbedaan indikator keberhasilan antara kedua jenis koperasi juga menjadi temuan penting. Pada KSU Banjar Adat, keberhasilan terutama tercermin dari tingginya SHU per anggota, kepatuhan RAT, dan loyalitas anggota. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi adat lebih berorientasi pada kepuasan internal dan keberlanjutan komunitas. Anggota menilai keberhasilan koperasi bukan hanya dari seberapa besar aset yang dimiliki, tetapi juga dari sejauh mana koperasi mampu memenuhi kebutuhan mereka secara adil dan menjaga solidaritas komunitas. Sebaliknya, pada KSU Konvensional, keberhasilan lebih banyak diukur dari pertumbuhan aset, jumlah anggota, dan ekspansi kelembagaan. Ukuran keberhasilan yang digunakan lebih bersifat formal dan sesuai dengan logika kelembagaan modern. Perbedaan indikator ini menunjukkan adanya dua logika keberhasilan koperasi: logika komunitas pada koperasi adat, dan logika pertumbuhan pada koperasi konvensional.

Kelima, hasil analisis inferensial menegaskan perbedaan jalur keberhasilan tersebut. Partisipasi anggota dan social capital terbukti lebih dominan pada koperasi adat, sedangkan peranan pemerintah lebih dominan pada koperasi konvensional. Hasil **multi-group analysis (MGA)** mengonfirmasi bahwa tipe koperasi memoderasi hubungan antar variabel, sehingga jalur pengaruh tidak seragam. Dengan kata lain, tidak ada satu resep tunggal untuk menjelaskan keberhasilan koperasi; keberhasilan harus dipahami sebagai hasil dari kesesuaian antara konteks kelembagaan dan faktor yang mendukungnya. Hal ini sesuai dengan kerangka **contingency theory** yang menekankan bahwa kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara karakteristik internal dan lingkungan eksternalnya.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur koperasi di Indonesia dengan menegaskan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi dan manajerial, tetapi juga pada faktor sosial budaya dan kebijakan publik. Partisipasi anggota dan social capital menjadi bukti nyata bahwa kearifan lokal dapat menopang keberhasilan koperasi secara berkelanjutan. Sementara itu, peranan pemerintah membuktikan pentingnya dukungan eksternal bagi koperasi formal. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengisi celah dalam kajian koperasi dengan menunjukkan bahwa konteks kelembagaan sangat menentukan jalur keberhasilan koperasi.

Secara praktis, temuan penelitian memberikan implikasi bagi kebijakan pengembangan koperasi di Buleleng dan Bali secara umum. Untuk KSU Banjar Adat, penguatan keberhasilan dapat dilakukan dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya yang menjadi basis partisipasi anggota. Pemerintah sebaiknya memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi yang sesuai dengan kearifan lokal, bukan

intervensi yang justru melemahkan modal sosial komunitas. Sementara itu, bagi koperasi konvensional, strategi pengembangan harus lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas manajerial, akses pada sumber permodalan, dan kepatuhan terhadap regulasi formal, karena koperasi jenis ini sangat bergantung pada dukungan eksternal.

4.2 Diskusi

Secara keseluruhan, diskusi temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat **dua jalur utama keberhasilan koperasi di Kabupaten Buleleng**. Jalur pertama adalah jalur berbasis komunitas, di mana keberhasilan dibangun melalui partisipasi anggota dan social capital yang kuat. Jalur kedua adalah jalur berbasis kebijakan, di mana keberhasilan koperasi sangat bergantung pada peranan pemerintah. Kedua jalur ini memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan, sehingga strategi pengembangan koperasi idealnya mengintegrasikan keduanya. Sinergi antara kekuatan internal komunitas dan dukungan eksternal dari pemerintah diharapkan mampu menciptakan koperasi yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan di Bali.

Hasil penelitian ini memberikan peluang untuk tidak hanya menguji teori yang sudah ada, tetapi juga untuk menyusun kerangka teoretis baru yang lebih sesuai dengan konteks lokal, atau memodifikasi teori yang telah mapan. Selama ini, teori tentang keberhasilan koperasi banyak bertumpu pada tiga kerangka besar: (1) **teori partisipasi anggota** yang menekankan pentingnya keterlibatan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi; (2) **teori social capital** (Putnam, 1993) yang menekankan peran kepercayaan, norma, dan jejaring dalam menopang keberhasilan lembaga kolektif; serta (3) **teori peranan negara/pemerintah** dalam pemberdayaan koperasi, yang umumnya melihat bahwa kebijakan publik dan dukungan regulasi menjadi pilar keberhasilan kelembagaan koperasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga teori tersebut memang relevan, tetapi tidak cukup menjelaskan perbedaan pola keberhasilan koperasi pada dua tipe kelembagaan yang berbeda, yaitu KSU Banjar Adat dan KSU Konvensional. Pada koperasi adat, keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh **kombinasi antara partisipasi anggota dan modal sosial berbasis budaya**, sementara peranan pemerintah relatif kecil. Sebaliknya, pada koperasi konvensional, keberhasilan justru lebih banyak bergantung pada **dukungan pemerintah** dan kapasitas manajerial, sementara partisipasi anggota dan social capital berperan lebih terbatas.

Dari sini, penelitian ini mengusulkan adanya **modifikasi teori keberhasilan koperasi** menjadi sebuah model baru yang bisa disebut **“Teori Dualitas Jalur Keberhasilan Koperasi”** (*Dual Path of Cooperative Success Theory*). Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan koperasi dapat ditempuh melalui dua jalur yang berbeda namun saling melengkapi:

1. Jalur Berbasis Komunitas (Community-Based Path): jalur ini menekankan bahwa keberhasilan koperasi ditentukan oleh partisipasi aktif anggota dan social capital yang kuat. Jalur ini relevan pada koperasi berbasis adat atau komunitas lokal yang memiliki kohesi sosial tinggi, seperti KSU Banjar Adat di Bali. Keberhasilan dicapai bukan melalui intervensi eksternal, tetapi melalui solidaritas internal yang terbangun dari norma sosial dan budaya.

2. Jalur Berbasis Kebijakan (Policy-Based Path): jalur ini menekankan bahwa keberhasilan koperasi lebih bergantung pada dukungan pemerintah, regulasi yang jelas, akses terhadap pembiayaan, dan pembinaan manajerial. Jalur ini relevan pada koperasi formal atau konvensional yang beroperasi dalam kerangka birokrasi modern. Keberhasilan dicapai melalui legitimasi dan fasilitasi eksternal, bukan semata-mata dari ikatan sosial internal.

Teori ini memodifikasi kerangka lama yang cenderung menganggap faktor partisipasi, social capital, dan peranan pemerintah memiliki pengaruh seragam terhadap semua koperasi. Kenyataannya, pengaruh ketiga faktor tersebut **bersifat kontekstual**, sangat tergantung pada karakter kelembagaan koperasi itu sendiri. Dengan kata lain, teori baru ini menekankan pentingnya **kontekstualisasi teori koperasi**: keberhasilan koperasi harus dipahami dalam hubungan dialektis antara faktor internal (anggota dan komunitas) dengan faktor eksternal (negara dan regulasi).

Selain itu, teori ini juga dapat dipandang sebagai **integrasi antara teori partisipasi, teori social capital, dan teori peranan pemerintah**, dengan menambahkan dimensi baru berupa **“moderasi kelembagaan”**. Artinya, pengaruh faktor-faktor tersebut tidak absolut, tetapi dimoderasi oleh jenis kelembagaan koperasi. Pada KSU Banjar Adat, kelembagaan adat menjadi moderator yang memperkuat pengaruh partisipasi dan social capital. Pada KSU Konvensional, kelembagaan formal menjadi moderator yang memperkuat peranan pemerintah.

Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya mereplikasi teori yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual berupa teori baru yang lebih kontekstual. Teori **Dualitas Jalur Keberhasilan**

Koperasi ini dapat digunakan untuk memahami fenomena koperasi di Indonesia yang memang sangat beragam, baik dari sisi sejarah, sosial budaya, maupun dukungan kebijakan. Teori ini juga membuka ruang untuk penelitian lanjutan, misalnya dengan menguji jalur keberhasilan koperasi di daerah lain yang memiliki karakter budaya berbeda, atau dengan mengembangkan indikator keberhasilan koperasi yang disesuaikan dengan konteks lokal.

5. KESIMPULAN

Penelitian mengenai *“Analisis Partisipasi Anggota, Social Capital, dan Peranan Pemerintah terhadap Keberhasilan Koperasi (Studi Komparatif antara KSU Banjar Adat dengan KSU Konvensional di Kabupaten Buleleng)”* menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana faktor internal dan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan koperasi dalam dua konteks kelembagaan yang berbeda. Hasil penelitian memperlihatkan dengan jelas bahwa keberhasilan koperasi tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dinamis antara partisipasi anggota, kekuatan modal sosial, dan dukungan pemerintah. Namun, pola pengaruh dari ketiga faktor tersebut ternyata sangat bergantung pada jenis kelembagaan koperasi, yaitu apakah koperasi berbasis adat (Banjar Adat) atau koperasi formal konvensional.

Pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa **partisipasi anggota** merupakan salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan koperasi, baik pada KSU Banjar Adat maupun pada KSU Konvensional. Akan tetapi, pengaruh partisipasi anggota lebih kuat pada koperasi adat karena keanggotaan diikat oleh norma sosial dan budaya banjar. Kehadiran anggota dalam RAT, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta kontribusi finansial melalui simpanan dipandang sebagai kewajiban moral sekaligus kewajiban kelembagaan. Kondisi ini berbeda dengan koperasi konvensional, di mana partisipasi lebih bergantung pada persepsi manfaat ekonomi semata. Dengan demikian, partisipasi anggota terbukti menjadi fondasi keberhasilan koperasi adat yang berbasis komunitas.

Kedua, penelitian ini menegaskan bahwa **social capital** berperan signifikan dalam menopang keberhasilan koperasi. Social capital berupa kepercayaan, norma kebersamaan, jejaring sosial, dan budaya gotong royong terbukti lebih kuat di KSU Banjar Adat dibandingkan dengan KSU Konvensional. Modal sosial ini berfungsi sebagai “lem sosial” yang merekatkan anggota, mengurangi biaya transaksi, dan meminimalkan risiko moral hazard. Pada koperasi konvensional, hubungan antar anggota cenderung lebih bersifat fungsional dan pragmatis sehingga social capital relatif lebih rendah. Oleh karena itu, keberhasilan KSU Banjar Adat sebagian besar ditopang oleh kekuatan internal berupa modal sosial yang diwariskan dari tradisi budaya lokal.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa **peranan pemerintah** berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan KSU Konvensional, tetapi tidak berpengaruh signifikan pada KSU Banjar Adat. Koperasi konvensional sangat bergantung pada intervensi eksternal berupa regulasi, pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi akses pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah. Dukungan ini menjadi salah satu faktor utama yang menentukan pertumbuhan aset, jumlah anggota, dan perluasan usaha koperasi konvensional. Sebaliknya, pada koperasi adat, peranan pemerintah tidak terlalu menentukan karena keberhasilan mereka lebih banyak bergantung pada solidaritas internal. Hal ini memperlihatkan bahwa koperasi adat relatif lebih mandiri, sedangkan koperasi konvensional lebih bergantung pada kebijakan dan dukungan pemerintah.

Keempat, penelitian ini menemukan adanya **perbedaan indikator keberhasilan koperasi**. Pada KSU Banjar Adat, keberhasilan lebih tampak pada tingginya SHU per anggota, kepatuhan RAT, dan loyalitas anggota. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi adat lebih menekankan pada keberlanjutan internal dan kesejahteraan anggota secara langsung. Sebaliknya, pada koperasi konvensional, keberhasilan lebih banyak tercermin dalam pertumbuhan aset, jumlah anggota, dan ekspansi kelembagaan yang menunjukkan orientasi pada pertumbuhan formal. Perbedaan indikator ini memperlihatkan adanya dua logika yang berbeda dalam mengukur keberhasilan koperasi: logika komunitas pada koperasi adat dan logika pertumbuhan pada koperasi konvensional.

Kelima, analisis jalur dan multi-group analysis memperkuat kesimpulan bahwa terdapat **dua jalur utama keberhasilan koperasi di Buleleng**. Jalur pertama adalah *community-based path*, yaitu jalur berbasis komunitas yang ditandai dengan dominannya peran partisipasi anggota dan social capital, sebagaimana terjadi pada KSU Banjar Adat. Jalur kedua adalah *policy-based path*, yaitu jalur berbasis kebijakan di mana keberhasilan koperasi ditopang oleh dukungan pemerintah, sebagaimana terlihat pada KSU Konvensional. Kedua jalur ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tidak ada satu model keberhasilan koperasi yang bisa dianggap berlaku universal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan koperasi di Kabupaten Buleleng bersifat **kontekstual dan dualistik**. KSU Banjar Adat membuktikan bahwa partisipasi

anggota dan modal sosial dapat menjadi sumber utama keberhasilan koperasi tanpa banyak bergantung pada pemerintah. Sebaliknya, KSU Konvensional menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dapat menjadi faktor dominan dalam menjaga keberhasilan koperasi formal yang lebih berorientasi pada pertumbuhan. Oleh karena itu, strategi pengembangan koperasi di daerah ini tidak boleh bersifat seragam, tetapi harus diferensiatif sesuai dengan konteks kelembagaannya. Integrasi antara kekuatan internal (partisipasi anggota dan social capital) dengan dukungan eksternal (peranan pemerintah) akan menjadi kunci dalam menciptakan koperasi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris untuk memahami keberhasilan koperasi di Bali, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis melalui pengembangan model baru yang disebut sebagai **“Dualitas Jalur Keberhasilan Koperasi”**. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan koperasi dapat ditempuh melalui dua jalur berbeda—berbasis komunitas dan berbasis kebijakan—yang keduanya sama-sama sah tergantung pada karakteristik kelembagaan koperasi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pengembangan koperasi yang lebih kontekstual, berbasis budaya lokal, dan sekaligus responsif terhadap dinamika ekonomi modern.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Bali. BPS; 2023.
- Sugiyanto & DRE. Koperasi dalam perspektif keuangan: Reformulasi Penilaian Kinerja Menuju Koperasi Modern. . Ikopin University Press.; 2024.
- Kusmiati E, Masyita D, Febrian E, Cahyandito MF. A study on the determinants of successful performance of Indonesian cooperatives. *Int J Soc Econ*. 2023 Aug 28;50(9):1285–301.
- Pradana M, Utami DG, Wahyuni AS, Serpian S, Usman A, Astuti AD. Digital Marketing Strategy in Indonesia: A Short Bibliometric Review. In 2023. p. 283–90.
- Hafidh AAHN, Rahayu A, Hendrayati H. Digital Marketing Trends and Innovations in Indonesia: A Qualitative Exploration of Emerging Practices. *Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen*. 2024 Jun 3;12(1):50–3.
- *S. PENTINGYA PARTISIPASI ANGGOTA DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN USAHA KOPERASI. *INFORMASI*. 2010 Jan 3;36(1).
- Susanto A, & LD. Modal sosial dan keberhasilan kelembagaan koperasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 30(2), 150–162. 2022;
- Nasution dan Hidayat. *Manajemen Koperasi* . Vol. satu. Graha Ilmu ; 2017.
- Ruslani A, Kurniawan B, Suyono N, Faqih A, Hidayat YR. Analysis of Member Satisfaction Levels Regarding the Quality of Cooperative Services: The Case of the Karya Mekar Farmers' Cooperative in Selajambe Village, Selajambe District, Kuningan Regency. *Journal of World Science*. 2025 Feb 19;4(2):228–46.